

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGUPAHAN
DENGAN SISTEM BAGI HASIL
(Studi kasus di Rumah Makan Padang Dua Saudara Tirtayasa Grup I
Sukabumi, Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Di Melengkapi Tugas-Tugas Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

ZELIANA TRI UTARI

1521030307

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H/ 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGUPAHAN
DENGAN SISTEM BAGI HASIL
(Studi kasus di Rumah Makan Padang Dua Saudara Tirtayasa Grup I
Sukabumi, Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Di Melengkapi Tugas-Tugas Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

ZELIANA TRI UTARI

1521030307

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



Pembimbing I : Dr. H. Irwantoni, M.Hum

Pembimbing II : Juhratul Khulwah, M.S.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H/ 2020 M**

ABSTAK

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain. Contohnya hukum Islam yang termasuk upah-mengupah. Di era global saat ini, banyak praktik pengupahan yang diterapkan oleh pengusaha terhadap karyawannya sering membuat ketidakpuasan karyawan tersebut atas balas jasa dari pengusaha. Kebanyakan pengusaha menentukan upah karyawannya dengan menentukan jumlah gaji perbulannya di saat akad perjanjian awal bekerja. Akan tetapi di rumah makan tidak ditentukan berapa besar gaji yang akan diterima oleh karyawan tersebut. Setiap bulannya karyawan tidak menentu mendapatkan hasil gaji yang tetap. Sedangkan menurut Hukum Islam menetapkan upah seseorang harus ditentukan di awal akad, namun yang terjadi di lapangan karyawan hanya diberitahukan Sistem gaji yang diperoleh selama sebulan menggunakan akad Bagi Hasil. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; 1) Bagaimana Praktik pengupahan dalam bentuk sistem bagi hasil dan pemberian fasilitas kepada karyawan di Rumah Makan Padang Dua Saudara Tirtayasa Grup I Sukabumi, Bandar Lampung?, 2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pengupahan dalam bentuk sistem bagi hasil dan pemberian fasilitas kepada karyawan di Rumah Makan Padang Dua Saudara Tirtayasa Grup I Sukabumi, Bandar Lampung? Tujuan Penelitian ini yaitu 1) Untuk mengetahui bagaimana Praktik pengupahan dalam bentuk sistem bagi hasil dan pemberian fasilitas kepada karyawan di Rumah Makan Padang Dua Saudara Tirtayasa Grup I Sukabumi, Bandar Lampung, 2) Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pengupahan dalam bentuk sistem bagi hasil dan pemberian fasilitas kepada karyawan di Rumah Makan Padang Dua Saudara Tirtayasa Grup I Sukabumi, Bandar Lampung. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer yang diambil dari sejumlah responden yang terdiri dari pihak karyawan dan pemilik rumah makan. Sedangkan data skunder dapat dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat di kemukakan bahwa, Tinjauan Hukum Islam tentang pengupahan dengan sistem bagi hasil ini jika dilihat dari segi objeknya, upah mengupah ini termasuk upah mengupah yang sah, karena terpenuhinya rukun upah mengupah. Namun dalam pelaksanaan pengupahan berdasarkan hasil yang penelitian lakukan masih ada kesenjangan teori hukum Islam. Yang mana praktik pengupahan terhadap karyawan belum memenuhi syarat *ijarah* seperti akad yang masih dilakukan dalam bentuk lisan dan upah yang diterima karyawan belum jelas dan dapat merugikan salah satu pihak. Sedangkan Menurut peneliti hal tersebut tidak boleh, karena merugikan karyawan yang bekerja. Dalam Hukum Islam telah dijelaskan bahwa pengupahan tidak boleh merugikan salah satu pihak.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Zeliana Tri Utari

NPM : 1521030307

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PENGUPAHAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL
(Studi di Rumah Makan Padang Dua Saudara
Tirtayasa Grup I Sukabumi, Bandar Lampung)**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* dan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Februari 2020

Zeliana Tri Utari
NPM. 1521030307



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarampe, Bandar Lampung (0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PENGUPAHAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL
(Studi di Rumah Makan Padang Dua Saudara Tirtayasa
Grup I Sukabumi, Bandar Lampung)**
Nama Mahasiswa : Zeliana Tri Utari
NPM : 1521030307
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : (Mu'amalah) Hukum Ekonomi Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas
Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.**

Pembimbing I

Drs. H. Irwantoni, M.Hum
NIP. 197403072000121000

Pembimbing II

Juhratul Khulwah, M.S.I
NIP. 197504282007101003

Mengetahui

Ketua Prodi Muamalah,

Khoirudin, M.S.I
NIP. 197807252009121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGUPAHAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL (Studi di Rumah Makan Padang Dua Saudara Tirtayasa Grup I Sukabumi, Bandar Lampung)"**, disusun oleh **Zeliana Tri Utari, Npm 1521030307, Jurusan Muamalah**, telah Di Ujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan pada Hari/Tanggal : **Rabu, 05 Februari 2020.**

Tim Penguji

Ketua : Dr. H. Khoirul Abror, M.H.

Sekretaris : Abuzar Alghifari, S. Ud., M.Ag

Penguji Utama: Dr. Jayusman, M.Ag

Penguji I : Drs. H. Irwantoni, M. Hum.

Penguji II : Juhrotul Khulwah, M.S.I.



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. H. Khairuddin, M.H.
NID 6210221993031002**

MOTTO

أَعْطُوا الْأَجِيرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه عبد الرزاق عن أبي هريرة)

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.

(HR.IbnuMajah dari Ibnu Umar).



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahku Mei Dwiyono yang tercintai dan tersayang
2. Ibuku Siti Rohaini yang sangat ku cinta, ku sayang dan ku hormati yang sudah berkorban atas segalanya serta memberikan dukungan penuh kepadaku.
3. Kakak ku (Ahmad Sudrajat, Meike Dwiwi Bowo), Adik ku (Maya Catur Lestari, Zulia Pancawati), serta keluarga ku (Minsihmadi, wak sun, Bpk Muslim, Cik Herlina, Cik Her, Cik Sumianah, dan lainnya) yang selalu mendo'akan, membantu, memotivasi dan mendukung sepenuhnya.
4. Almamater Univesitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Zeliana Tri Utari Dilahirkan di Sukaraja, 12 Januari 1997 Dari Pasangan Bapak Mei Dwiyono dan Ibu Siti Rohaini, anak ke Tiga dari Lima Bersaudara, Pendidikan Yang Pernah Di Tempuh:

1. Sekolah Dasar di SDN 3 Sukaraja, yang diselesaikan pada tahun 2009.
2. Melanjutkan Pendidikan di SMP PGRI 1 Palas, yang diselesaikan pada tahun 2012.
3. Melanjutkan Kejenjang Pendidikan pada SMK Cahya Kartika Palas, selesai pada tahun 2015.
4. Melanjutkan Pendidikan Kejenjang Pendidikan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dan mengambil program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (muamalah) pada Fakultas Syari'ah Pada Tahun 2015 Sampai Sekarang.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. yaitu pernah mengikuti organisasi ekstrakuler Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai anggota kader pada Tahun 2015-2016.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Dengan Sistem Bagi Hasil Di Rumah Makan Padang Dua Saudara (Studi di Rumah makan Padang Dua Saudara Tirtayasa Grup I Sukabumi, Bandar Lampung”. Shalawat teriring salam semoga tetap selalu dilimpahkan oleh Allah SWT kepada junjungan kita yakni nabi besar Muhammad SAW, dan keluarga, sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa melaksanakan sunnahnya. Amiin

Dalam rangka penyelesaian skripsi ini, saya sadar bahwa telah banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dalam hal ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memeberikan kesempatan belajar dan menuntut ilmu bagi saya, pada Program Sarjana Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) yaitu Bapak Prof. Mukri, S.Ag.
2. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran dalam berbagai hal sehingga saya dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan lancar yaitu Bapak Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H.
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Prodi Muamalah yaitu Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I.

4. pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta arahan dengan penuh ketelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, yaitu Bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I
5. Tim penguji Skripsi : Bapak Dr. H. Khoirul Abror, M.H selaku Ketua Sidang, Bapak Dr. Jayusman, M.Ag, selaku Penguji Utama, Bapak Drs. H. Irwantoni, M. Hum. selaku Penguji I, Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I. selaku Penguji II, Bapak Abuzar Alghifari, S. Ud., M.Ag selaku Sekretaris.
6. Dosen yang juga telah membantu dan memberikan banyak motivasi, arahan, dan ikut serta membimbing dalam penyelesaian skripsi ini yaitu Bapak Muslim, S.H.I., M.H.I. dan Ibu Herlina, M.H.I., M.Sy
7. Bapak/Ibu Dosen lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik kami dalam dunia ilmu pengetahuan dan membuka wawasan untuk kami selama mengikuti perkuliahan.
8. Saudara-saudaraku, kakak dan adik-adik yang selalu mendukung, dan mendo'akan.
9. Teman-teman KKN 135 Melani W, Melani A, Riska, Marsela, Dwi, Rima Gontina, Syaiful, Ilham, Aan, Zain, Iqbal dan Joti.
10. Sahabat-sahabatku Ayu Siskareni, Ayu Lestari, Ade wahyuni, Cynthia R, dan Yeni Aryanti (yeyen) serta teman-teman seperjuangan kelas Muamalah H 2015.

Terimakasih atas jasa-jasa Bapak/Ibu berikan, semoga Allah SWT senantiasa selalu melimpahkan rahmatnya serta membalas amal kebaikan dan keikhlasan mereka sebagai amal shalih baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya bagi saya pribadi.

Bandar Lampung, 2019

Penulis

Zeliana Tri Utari
NPM. 1521030307



DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	8
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan Penelitian.....	9
G. Signifikasi Penelitian.....	9
H. Metode Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Hukum Islam Tentang Ijarah	
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	15
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	17
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	19
4. Macam-macam <i>Ijarah</i>	24
5. Sistem Penetapan <i>Ijarah</i>	25
6. Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i>	26
B. Hukum Islam Tentang <i>Mudharabah</i>	
1. Pengertian <i>Mudhrabah</i>	27
2. Dasar Hukum Bagi hasil	30
3. Rukun Dan Syarat Bagi Hasil	34
4. Prinsip <i>Mudharabah</i>	46
5. Macam-macam Bagi Hasil	50
6. Hikmah Bagi Hasil	54
7. Hak Dan Kewajiban <i>Shahibul Mal</i> Dan <i>Mudharib</i>	55
8. Berakhirnya Akad Bagi Hasil	58

C. Tinjauan Pustaka	62
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Rumah Makan Padang Dua Saudara	
1. Sejarah Singkat Rumah Makan Padang Dua Saudara	65
2. Lokasi Rumah Makan Padang Dua Saudara Tirtayasa Grup I	66
3. Struktur Rumah Makan Padang Dua Saudara Tirtayasa Grup I	67
4. Data Nama Pemilik dan Karyawan Rumah Makan Padang Dua Saudara Tirtayasa Grup I	69
5. Daftar Menu Makanan	70
B. Fasilitas Yang Diberikan Rumah Makan Padang Dua Saudara Tirtayasa Grup I	71
C. Sistem Upah Dalam Bentuk Bagi Hasil di Rumah Makan Padang Dua Saudara Tirtayasa Grup I Sukabumi, Bandar Lampung	72
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Praktik Pengupahan Dengan Sistem Bagi Hasil Di Rumah Makan Padang Dua Saudara Tirtayasa Grup I Sukabumi, Bandar Lampung	78
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Karyawan Dengan Sistem Bagi Hasil Di Rumah Makan Padang Dua Saudara Tirtayasa Grup I Sukabumi, Bandar Lampung	82
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	86
B. Rekomendasi	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.Bagan 1 Struktur Organisasi Rumah Makan Padang Dua Saudara

Tirtayasa Grup I Sukabumi, Bandar Lampung 68

Tabel 2.Data Nama Pemilik dan Karyawan Rumah Makan Padang Dua

Saudara Tirtayasa Grup I..... 69

Tabel 3. Daftar menu makan dan minuman di Rumah Makan Padang Dua

Saudara Tirtayasa Grup I Sukabumi, Bandar Lampung 70



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Rekomendasi Penelitian Kesbangpol Bandar Lampung

Lampiran 2. Surat Perizinan Riset Kesbangpol

Lampiran 3. Blangko Konsultasi Bimbingan Skripsi

Lampiran 4. Panduan Wawancara Kepada Pemilik Rumah Makan Padang Dua
Saudara Grup I Tirtayasa Sukabumi, Bandar Lampung

Lampiran 5. Panduan Wawancara Kepada Kayawan Rumah Makan Padang
Dua Saudara Grup I Tirtayasa Sukabumi, Bandar Lampung

Lampiran 6. Surat Keterangan Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami sekripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan sekripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Dengan Sistem Bagi Hasil (Studi Kasus Rumah Makan Padang Dua Saudara Tirtayasa Grup I Sukabumi, Bandar Lampung)” Untuk itu perlu diuraikan pengertian dan istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut :

Hukum Islam adalah merupakan tuntunan, tata aturan yang harus ditaati dan diikuti oleh manusia perwujudan pengamalan al-Qur'an dan As-sunnah serta Ijma sahabat.¹ Hukum Islam dalam hal ini lebih spesifik pada hukum Islam yang mengatur hubungan antar sesama manusia, yakni fiqih Muamalah.

Upah adalah penukaran, atau imbalan dari manfaat atau menjual tenaga dengan imbalan mendapat penggantinya.²

¹ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung:Pustaka Setia,2009), h. 51.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2005), h. 115.

Sistem Bagi Hasil (*mudharabah*) adalah perangkat metode yang secara teratur saling berkaitan dari perjanjian kerja sama antara dua orang atau antara pemilik modal dengan yang menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa didalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan nisbah kesepakatan diawal perjanjian dan begitu pula bila mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Berdasarkan uraian diatas, maka maksud judul sekripsi ini adalah mengkaji tentang bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pengupahan dengan sistem bagi hasil di Rumah Makan Padang Dua Saudara Sukabumi, Bandar Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

- a. Pelaksanaan upah bagi Rumah Makan Padang Dua Saudara Tirtayasa Grup I Sukabumi, Bandar Lampung diduga terdapat ketidak jelasan dalam pengupahan dalam bentuk Bagi Hasil. Pelaksanaan upah ini dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.

2. Alasan Subjektif

Dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan subjektif adalah sebagai berikut:

- a. Dalam penulisan skripsi ini, penulis didukung oleh data yang akurat yang terdapat di perpustakaan maupun yang diperoleh dilapangan sebagai bahan rujukan yang berhubungan dengan topik penelitian yang cukup banyak, hingga diperkirakan dalam penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
- b. Ketersediaan data atau informasi yang penulis butuhkan terkait judul yang akan diteliti, baik data primer maupun sekunder memiliki kemudahan akses dan letak objek penelitian yang mudah dijangkau.
- c. Pembahasan ini sangat relavan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Islam (Muamalah).

C. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah peraturan yang diciptakan Allah Swt untuk mengatur hubungan manusia dalam hidup dan kehidupan, untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmani dengan cara yang paling baik diantara sekian banyak termasuk dalam perbuatan muamalah adalah sistem kerja sama pengupahan.³ Hal ini dimaksudkan sebagai usaha kerja sama saling menguntungkan antara kedua belah pihak dalam rangka meningkatkan kualitas bekerja.

Salah satu bentuk muamalah yang terjadi adalah kerjasama antar manusia dan satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang

³ *Ibid.*, h.2.

disebut sebagai pekerja, dipihak lain yang menyediakan pekerjaan atau lahan pekerjaan yang disebut Bos, untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak pekerja mendapat kompensasi berupa upah. Kerja sama ini dalam literatur fiqih disebut dengan akad *al-a'mal*, yaitu sewa menyewa jasa manusia.⁴

Pengertian upah dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya, yang dibayarkan sebagai balasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu seperti gaji.⁵ Upah dalam Islam dikenal dengan istilah *ujroh*. Secara etimologi kata *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru'* yang bearti *al-'iwad* yang dalam Bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.⁶

Pekerjaan yang dikerjakan oleh orang yang diupah adalah amanah yang menjadi tanggung jawabnya. Ia wajib menunaikannya dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikannya dengan baik. Adapun upah untuk orang yang bekerja adalah utang yang menjadi tanggungan yang mempekerjakannya, dan ini adalah kewajiban yang harus ia tunaikan.⁷

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang dikerjakan dan masing-masing tidak rugi. Sehingga terciptalah keadilan di antara mereka. Dalam Q.S Al-Baqarah:233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ

⁴ Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka setia, 2001), h.215.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke- 4, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.1345.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid13*, (Bandung: PT.Alma'arif,1987), h.15.

⁷ Saleh Al-Fauzan, *Fikih Sehari-Hari*,(Jakarta: Gema Isnani Press,2005), h.488.

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain. Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.(Q.S. Al-Baqarah:233).

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah yang pantas kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.⁸

Syarat-syarat upah sudah ditentukan sedemikian rupa sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak, baik Bos maupun buruh (karyawan), supaya tercipta kesejahteraan dan tidak ada kesenjangan sosial. Konsekuensi yang timbul dari adanya ketentuan ini karena sistem pengupahan karyawan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang telah ditetapkan. Pada kenyataannya sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dan norma-norma tersebut sehingga muncul permasalahan yang berawal dari ketidakadilan bagi para karyawan terhadap upah yang diterimanya.

⁸ Muhammad Ashim, Izzudin Karimi, *Tafsir Muyassar 1 Memahami Al-Qur'an Dengan Terjemahan Dan Penafsiran Paling Mudah*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h.185.

Apabila syarat upah mengupah telah terpenuhi, maka akad upah mengupah dianggap sah menurut syara'. Sebaliknya syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka upah mengupah dianggap batal.

Upah merupakan instrumen untuk mengukur sejauh mana memahami dan mewujudkan karakter sosial. Karena sebagaimana telah dijelaskan upah pada dasarnya bukan merupakan persoalan yang berhubungan dengan uang. Melainkan merupakan persoalan yang lebih berkaitan dengan penghargaan manusia dengan sesamanya. Tentang penghargaan berarti tentang bagaimana memandang dan menghargai kehadiran orang lain dalam kehidupan.⁹

Praktik pengupahan yang terjadi di rumah makan ini yaitu dengan sistem Bagi Hasil yang diterapkan diberbagai rumah makan yang dilakukan oleh pemilik rumah Makan kepada pegawainya yang salah satunya dilakukan di Rumah Makan Padang Dua Saudara Sukabumi Bandar Lampung, dengan pihak penyedia jasa tenaga yang disebut pekerja (karyawan), dipihak lain yang menyediakan pekerjaan atau lahan pekerja yang di sebut Bos (pemilik rumah makan padang Dua Saudara). Tugas karyawan ini salah satunya yaitu bertanggung jawab atas pekerjaannya melayani pembeli, membersihkan rumah makan, dan menjaga rumah makan tetap bersih dan rapi (enak di pandang), akan di upah sebagai balasannya.

⁹ Yazin, Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h.197.

Pelaksanaan pembayaran upah karyawan di rumah makan Padang Dua Saudara ini tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan, pemilik rumah makan tidak memberitahukan berapa besar gaji yang akan didapatkan oleh karyawan setiap bulannya, pemilik (Bos) rumah makan ini hanya memberikan atau memberitahukan sistem gajinya saja yaitu dengan Sistem Bagi Hasil, kebanyakan pengusaha menentukan upah karyawannya dengan menentukan jumlah gaji perbulannya disaat akad perjanjian di awal bekerja. Akan tetapi di rumah makan ini tidak ditentukan berapa besar gaji yang akan diterima oleh karyawan tersebut. Setiap bulannya karyawan tidak menentu mendapatkan hasil yang tetap. Sedangkan menurut hukum Islam menetapkan upah seseorang harus ditentukan di awal akad, namun yang terjadi dilapangan karyawan hanya diberitahukan sistem gaji yang diperoleh selama sebulan menggunakan akad bagi hasil.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka sangat penting untuk diteliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut dengan pemahaman lebih jelas mengenai upah bagi karyawan dalam bentuk bagi hasil yang diduga dapat merugikan salah satu pihak, dan tinjauan hukum Islam terhadap upah dalam bentuk bagi hasil. Berdasarkan uraian diatas maka akan dikaji lebih dalam dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Dengan Sistem Bagi Hasil (Studi Kasus di Rumah Makan Padang Dua Saudara Tirtayasa Grup I Sukabumi, Bandar Lampung).

D. Fokus Penelitian

Dari berbagai permasalahan yang ada penelitian mengfokuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu pada permasalahan tentang Praktik pengupahan dalam bentuk sistem bagi hasil dan pemberian fasilitas kepada karyawan di Rumah Makan Padang Dua Saudara Tirtayasa Grup I Sukabumi, Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan dalam bentuk sistem bagi hasil dan pemberian fasilitas kepada karyawan di Rumah Makan Padang Dua Saudara Tirtayasa Grup I Sukabumi, Bandar Lampung.

E. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik pengupahan dalam bentuk sistem bagi hasil dan pemberian fasilitas kepada karyawan di Rumah Makan Padang Dua Saudara Tirtayasa Grup I Sukabumi, Bandar Lampung ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan dalam bentuk sistem bagi hasil dan pemberian fasilitas kepada karyawan di Rumah Makan Padang Dua Saudara Tirtayasa Grup I Sukabumi, Bandar Lampung ?

F. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sistem upah bagi karyawan dalam bentuk bagi hasil di Rumah Makan Padang Dua Saudara Tirtayasa Grup I Sukabumi, Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang sistem upah bagi karyawan dalam bentuk bagi hasil di Rumah Makan Padang Dua
- c. Saudara Tirtayasa Grup I Sukabumi, Bandar Lampung.

G. Signifikasi Penelitian

- a. Secara Teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam praktik pengupahan karyawan dalam bentuk sistem bagi hasil menurut Islam.
- b. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Mengingat penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data dilakukan

pengelolaan data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian). Dalam hal ini akan langsung mengamati dan meneliti tentang pengupahan dengan sistem bagi hasil di Rumah Makan Padang Dua Saudara Tirtayasa Grup I Sukabumi, Bandar Lampung.

2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi yang saat ini terjadi atau ada. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana pengupahan dengan sistem bagi hasil yang di lakukan di Rumah Makan Padang Dua Saudara Tirtayasa Grup I Sukabumi, Bandar Lampung.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Data primer yang didapat pada penelitian ini adalah dengan mewawancarai karyawan dan pemilik Rumah Makan Padang Dua Saudara Tirtayasa Grup I Sukabumi, Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang dalam melakukan analisis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data pendukung dari literatur-literatur tertulis seperti, buku-buku,

artikel, jurnal, karya ilmiah yang serupa serta bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Adapun yang menjadi bagian dari populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Rumah Makan Padang Dua Saudara Tirtayasa Grup I Sukabumi, Bandar Lampung Berjumlah 9 orang dan 1 Pemilik Rumah Makan Padang Dua Saudara Tirtayasa Grup I Sukabumi, Bandar Lampung.¹⁰

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel ini merupakan cerminan dari populasi yang sifat-sifatnya akan diukur dan mewakili populasi yang ada. Dengan adanya sampel ini maka proses penelitian akan lebih mudah dan sederhana.

Menurut Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa sekedar perkiraan maka apabila subjek kurang dari seratus, lebih baik diambil semua sehingga penelitian termasuk penelitian populasi.¹¹ Sampel disini saya mengambil dari keseluruhan populasi yaitu 10 orang di antaranya 1 pemilik rumah makan dan 9 karyawan.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta.2010), h.173.

¹¹ *Ibid.*, h.174.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam urusan menghimpun data untuk penelitian ini digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data penelitian dengan pengamatan.¹² Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap upah yang diterima oleh karyawan pada setiap bulannya.

b. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara (*Interview*) adalah teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti. *Interview* dilakukan dengan pihak karyawan dan pemilik Rumah makan terkait pembayaran upah dengan sistem Bagi Hasil yang terjadi di Rumah Makan Padang Dua Saudara Tirtayasa Grup I Sukabumi, Bandar Lampung.

6. Metode pengolahan data

a. Tahap Pemeriksaan data

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang sudah masuk terkumpul itu tidak logis dan meragukan.

¹²*Ibid.*, h.74.

Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

b. Tahap Sistematika data

Bertujuan menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

7. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya yang harus di tempuh adalah analisis. Analisis adalah tahap yang penting dan menentukan, pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil mencapai kesimpulan yang nantinya dapat di gunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.¹³

Metode analisis data ini, menggunakan metode deskriptif analisis, yakni digunakan dalam mencari dan mengumpulkan data, menyusun, dan menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada. Metode ini bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti yaitu menggambarkan tentang praktik pembayaran upah dengan sistem bagi hasil yakni antara pemilik rumah makan dan

¹³Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2002), h.41.

pengelola Rumah Makan Padang Dua Saudara (karyawan) ditinjau dari hukum Islam. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif analisis, yakni sebuah metode analisis yang mendiskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu yang faktual secara sistematis dan akurat.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Hukum Islam Tentang *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Upah dalam hukum Islam dikategorikan dalam konsep *ijarah*. Sedangkan *ijarah* sendiri lebih cenderung membahas masalah sewa-menyewa atau upah mengupah. Oleh karena itu, untuk menemukan pembahasan terkait upah dalam Islam relatif sedikit.

Upah menurut bahasa Arab disebut “*al-ujrah*” berarti “*al-iwadu*” (ganti) dan oleh sebab itu “*ath-thawab*” atau (pahala) dinamai *ajru* (upah).¹

Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah di perintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah di sepakati.²

Adapun definisi *ijarah* yang dikemukakan oleh para ulama fiqih yaitu:

a. Ulama Hanafiyah

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

Artinya: “Akad atas kemanfaatan dengan pengganti.”³

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 13*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), h.15.

² Khumedi ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.141.

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.121.

b. Ulama Asy-Syafi'iyah

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَّعْلُومٍ.

Artinya: “Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.”⁴

c. Ulama Malikiyah

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنَفَعَةٍ الْأَدَمِيِّ وَبَعْضِ الْمَنْقُولَاتِ

Artinya: “Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan sebagian yang dapat dipindahkan.”⁵

Nurimansyah Haribun mendeskripsikan bahwa upah adalah segala macam dalam bentuk penghasilan berupa uang ataupun barang pada suatu kegiatan ekonomi yang diperoleh buruh pekerja atas pekerjaannya dalam masa tertentu.⁶

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis yang dikutip Idris bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah pengambilan manfaat sesuatu benda tanpa mengurangi kadar nilai dan wujud bendanya dan yang berpindah hanyalah manfaat dari suatu benda yang di sewakan seperti lahan kosong yang dijadikan tempat parkir, rumah dan sebagainya.⁷

Upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau

⁴ *Ibid.*, h.121

⁵ Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.168.

⁶ Zainal Asikin, *Dasar Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h.68.

⁷ Idris, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h.232.

sebagaimana pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.⁸

Dari beberapa penjelasan upah diatas maka dapat disimpulkan bahwa upah ialah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pekerjaan yang sudah dilakukannya yang ditetapkan dan dibayarkan menurut kesepakatan bersama.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Memberikan upah kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan hukumnya boleh.⁹ Adapun dasar hukum yang disyariatkannya upah mengupah (*ijarah*) dalam Islam yaitu:

a. al-Qur'an Surat Ath-Thalaq :66 :6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: “Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya.”¹⁰

Ayat diatas menjelaskan tentang apabila seseorang telah memberikan jasa seperti menyusukan anakmu maka segerakanlah berikan upahnya kepada mereka.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2011), h.1108.

⁹ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis...*, h.142.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2007), h.559.

Allah berfirman: Dalam Qs. An-Nahl Ayat:16 :97.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنشَأَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ^ط
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan kebijakan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.¹¹

Selanjutnya dari QS. Al-Qashash :28 : 26-27.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَاجَ^ط
ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۖ^ط
سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: “Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”

“Dia (Syeikh Madyan), berkata, “Sesungguhnya, aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahu Dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan akutidak bermaksud memberatkan engkau. Insyallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik.”¹²

¹¹ Ibid., h.278.

¹² Ibid., h.388.

Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang anak yang meminta ayahnya agar mengangkat Musa sebagai pekerja, untuk mempekerjakannya yang dapat dipercaya lalu membayarkan upahnya yang telah disepakati di awal akad.

b. Al-Hadist

¹³ أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ. (رواهعبدالرزاق عن أبي هريرة)

Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.

(HR. Ibnu Majah dari Ibn Umar).

Hadist diatas menjelaskan bahwa segerakanlah melunasi hak seorang yang sudah bekerja setelah selesai pekerjaannya.

c. Ijma'

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi umat manusia.¹⁴

3. Rukun dan Syarat *Ijarah* (Upah)

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijarah* adalah *ijab* dan *qabul*, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijarah*, *al-isti'ar*, *al-iktira'*, dan *al-ikra*.

Adapun menurut Jumhur ulama, rukun *ijarah* ada 4 yaitu:

- 1) *'Aqid* (orang yang berakad).
- 2) *Shighat Akad*.
- 3) *Ujrah* (upah).

¹³ Muhammad bin Yazid Abu 'Abdullah Al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu majah* jilid II, (Dar al-Fikr, Beirut, 2004), h.20.

¹⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, h.123-124.

4) Manfaat.¹⁵

a. Rukun *ijarah* :

1) *Aqid* (orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad sewa-menyewa yaitu *Mu'jir* dan *Musta'jir*. *Mu'jir* seseorang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *Musta'jir* seseorang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu.

Seseorang yang sudah berakad *ijarah* disyaratkan untuk mengambil suatu manfaat barang yang akan dijadikan sebuah akad sehingga nantinya dapat mencegah terjadinya suatu perselisihan. Dan untuk kedua belah pihak yang sudah melakukan akad disyaratkan berkemampuan yaitu, keduanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil belum *baligh* dan belum dapat membedakan maka akad menjadi tidak sah.¹⁶

2) *Sighat* akad (*ijab qabul*)

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*sighatul 'aqd*), terdiri atas *ijab* dan *qabul*. Dalam hikim perjanjian Islam *ijab* dan *qabul* dapat melalui: 1) ucapan, 2)

¹⁵ *Ibid.*, h.125.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: pena Ilmu dan Amal, 2006), h.205.

utusan atau tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam semata.¹⁷

Dalam hukum perikatan Islam ijab diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.¹⁸ Sedangkan *qabul* adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk menerima kehendak dari pihak pertama, yaitu setelah adanya ijab.¹⁹ Sedangkan syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab *qabul* pada jual beli, hanya saja ijab *qabul* dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.²⁰

Apabila ijab dan *qabul* telah memenuhi persyaratannya, terwujudlah perizinan timbal balik yang direpresentasikan oleh ijab dan *qabul* sehingga substansi rukun kedua dari akad pun terpenuhi.²¹

3) *Ujrah* (Upah)

Berdasarkan penentuan upah kerja, syariat Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasul.

Ujrah (Upah) dapat digolongkan menjadi 2 yaitu:

¹⁷ Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grando Persada, 2007), h.136.

¹⁸ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h.63.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h.117.

²⁰ Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Asy-Syifa', 2005), h.378.

²¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.122.

- a) Upah yang telah disebutkan (*ajr-musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai dengan adanya kerelaan (diterima oleh kedua belah pihak).
- b) Upah yang sepadan (*ajr al-mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.²²

Selain itu upah yang diberikan berupa harta yang secara syar'i bernilai dan upah hendaknya diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.²³ pemberian upah atau imbalan dalam ujah mestinya berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.

4) Manfaat

Untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang yang diakadkan) yakni dengan cara menjelaskan manfaatnya terlebih dahulu, dengan menjelaskan pembatasan waktu, atau

²² Nurur Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis*, (Jakarta: Kencana, 2013), h.230.

²³ *Ibid.*, h.118.

menjelaskan jenis pekerjaan yang dimaksud, jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.²⁴

b. Syarat *ijarah* sebagai berikut:

Mengenai syarat-syarat *ijarah* (Upah), Taqiyyudin an-Nabhani memberikan kriteria sebagai berikut:

- 1) upah hendaklah jelas dengan bukti dan cari yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.
- 2) Upah harus dibayarkan segera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.
- 3) Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang, barang atau jasa).
- 4) Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Sesuai di sini adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan berharga maksudnya adalah upah tersebut dapat diukur dengan uang.
- 5) Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya.

²⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, h.126.

- 6) Barang pengganti upah yang diberikan cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi atau berbau kurang sedap.²⁵

4. Macam-macam *Ijarah*

Dari segi objeknya, akad *al-ijarah* dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. *Ijarah* yang bersifat manfaat

Umpamanya seperti sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewanya.

b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan

ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini dibolehkan asalkan yang dikerjakan jelas pekerjaannya, seperti tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang las, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua

²⁵ Taqiuddin al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gus, 196), h.103.

bentuk *ijarah* terhadap pekerjaan ini hukumnya boleh atau diperbolehkan.²⁶

5. Sistem Penetapan *Ijarah*

Kita telah mengetahui bahwa jumlah upah boleh diterapkan dengan perundingan, boleh bergantung kepada persetujuan kolektif, boleh diperlakukan berdasarkan kebiasaan atau praktik perusahaan, atau ditetapkan menurut kombinasi dari cara-cara tersebut. Secara luar biasa dalam keadaan tidak ada persetujuan, ada kewajiban untuk membayar upah dengan jumlah yang pantas.²⁷

Adanya perbedaan tingkat pekerjaan karena setiap individu mempunyai kemampuan maupun bakat yang berbeda yang mengakibatkan penghasilan dan hasil material yang berbeda pula setiap individunya.

Islam pun mempunyai ketentuan yang masih bisa dijadikan pedoman dalam penetapan upah karyawan. Adapun acuan dalam ketentuan Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Islam memberikan pengupahan berdasarkan hasil.
- 2) Islam dalam memberikan upah tidak melihat sisi gender, tetapi berdasarkan apa yang dikerjakannya.
- 3) Dari sisi waktu, semakin cepat semakin baik.
- 4) Dari sisi keadilan, pekerja yang sama dengan hasil yang sama, seharusnya dibayar yang sama pula (proporsional).

²⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.236.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Business Law Karya Marsh and Soulsby, 1986), h.330.

- 5) Dalam memberikan upah, besaran minimum pekerjaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasarnya berdasarkan ukuran umum masyarakat.²⁸

6. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Suatu akad yang berakhir yaitu:

- a. Objek atau bendanya hilang atau musnah seperti kontrakan atau rumah terbakar ataupun sepatu yang dititipkan hilang.
- b. Habis tenggang waktu yang disepakati, seperti kontrakan (rumah) apabila kontrakan ini sudah habis waktunya maka kontrakan ini di kembalikan ke pemilik aslinya, seperti kesepakatan di awal akad yang sudah di sepakati bersama antara kedua belah pihak.

Kedua penjelasan diatas disepakati oleh ulama.²⁹

Menurut Mazab Hanafi, akad ini berakhir apabila salah seorang itu meninggal dunia, karena manfaat tidak dapat diwariskan. Berbeda dengan Jumhur ulama, akad tidak berakhir (batal) karena manfaat dapat diwariskan. Dan sedangkan Menurut Mazhab Hanafi, apabila ada udzur seperti rumah disita, maka akad berakhir. Sedangkan Jumhur ulama melihat, bahwa udzur yang membatalkan *ijarah* itu apabila objeknya atau barangnya

²⁸ Dep Pengembangan Bisnis, Perdagangan & Kewirausahaan Syariah Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Gramata Publising, 2011), h.16.

²⁹ AbdulRahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2020), h.283.

mengandung cacat atau manfaatnya hilang seperti kebakaran atau dilanda banjir.³⁰

B. Hukum Islam Tentang Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah arti asalnya “berjalan diatas bumi untuk berniaga” atau yang disebut dengan *qiradh* yang arti asalnya saling mengutang atau saling meminjamkan. *Mudharabah* mengandung arti “kerja sama dua belah pihak yang satu diantaranya menyerahkan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan atau dikerjakan, sedangkan keuntungannya dibagi diantara keduanya menurut kesepakatan”.

Mudharabah berasal dari kata *ad-dharb* yaitu bepergian untuk urusan dagang.³¹ Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Muzamil: 20 yaitu:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ

Artinya: “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”.³²

Kata *Mudharabah* berasal dari kata *dharabah* pada kalimat *Al-dharab*, yakni bepergian untuk urusan dagang. Menurut bahasa kata Abdurrahman Al Jaziri, *Mudharabah* bearti ungkapan terhadap pemberian harta seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha yang keuntungannya dibagi antara kedua belah pihak itu yang bersangkutan, dan apabila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.³³

³⁰ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.237-238.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemahan kamaluddin A Marzuki, Jilid XIII, (Bandung: Al Ma'arif, 1997), h.36.

³² Kementerian Agama, *Al-qur'an Tajwid dan Terjemah*, h.575.

³³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993), h.11.

Ad-qardhu disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang artinya *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut *mudharabah* atau *qiradh* dengan muamalah.³⁴

Mudharabah adalah sistem kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih di mana pihak pertama *shahibul mal* yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, sedangkan nasabah sebagai pengelola (*mudarib*) mengajukan permohonan pembiayaan dan untuk ini nasabah sebagai pengelola menyediakan keahliannya.

Menurut istilah, *Mudharabah* atau *qirdh* dikemukakan oleh para ulama yaitu *mudharabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling bertanggung jawab, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah disepakati dari keuntungan, seperti setengahnya atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun para Fuqaha ini berbeda pendapat sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah, *Mudharabah* ialah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan(laba), karena harta yang diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa yang ,mengelola harta itu.

³⁴ Muhammad Al-Syarbini, *Al-Iqna Fi Hall Al-Alfadz Abi Syufa*, (Indonesia: Dar Al-Ihya Al-Kutub Al-A'rabiyyah), h.53.

عُقْدٌ عَلَى السَّرْكَهٖ فِي الرَّبْحِ بِمَالٍ مِنْ أَحَدٍ لِّجَانِبَيْنِ وَ عَمَلٍ
مِنْ أَلَا خَرٍ

Artinya: “Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa”.³⁵

- b. Imam Hanabilah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah:

عِبَارَةٌ أَنْ يَدْفَعُ صَاحِبُ الْمَالِ قَدْرًا مُعَيَّنًا مِنْ مَالِهِ إِلَى مَنْ يَتَجَرَّ فِيهِ
بُحْرٌ مَعْلُومٌ مِنْ رِبْحِهِ

Artinya: “Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”.³⁶

- c. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah:

عُقْدٌ يَقْتَضِي أَنْ يَدْفَعَ شَخْصٌ لِمَنْ لَا يَتَجَرَّ فِيهِ
Artinya: “Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan”.³⁷

- d. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.³⁸

- e. Menurut Imam Taqiyuddin

عُقْدٌ عَلَى نَقْدٍ لِيَتَصَرَّفَ فِيهِ الْعَامِلُ يَأْتِيهِ التَّجَارَةُ

Artinya: “Akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan”.³⁹

³⁵ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah...*, h.189.

³⁶ *Ibid.*, h.190.

³⁷ *Ibid.*, h.190.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Terjemah Fikih Sunnah*, Jilid XIII, (Bandung: AL Ma’arif, 1997), h.37.

³⁹ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah...*, h.190.

Mudharabah atau penanaman modal ini artinya adalah menyerahkan atau memberikan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Bentuk usaha ini melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang memiliki modal namun tidak bisa berbisnis, dan pihak kedua yang pandai berbisnis namun tidak memiliki modal. Melalui usaha ini, keduanya saling melengkapi.⁴⁰

Setelah diketahui bahwa beberapa pengertian diatas yang menjelaskan bahwa para ulama diatas, kiranya dapat dipahami bahwa *mudharabah* atau *qiradh* ialah akad antar pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dari dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.

2. Dasar Hukum Bagi Hasil

Bahwa Islam itu membolehkan kepada umatnya untuk memberikan kemudahan kepada umat manusia lainnya. Sebagian manusia atau orang memiliki sebagian harta, akan tetapi dia orang yang lemah akan kemampuannya untuk menjadikannya harta kembali. Hal tersebut menjadi salah satu alasan Islam untuk bermuamalah, agar ke dua belah pihak tersebut bisa masing-masing mengambil manfaatnya.

⁴⁰ Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Daruq Haq, 2008), h.168.

Melakukan *mudharabah* hukumnya mubah (boleh). Adapun dasar hukum *mudharabah* yang disyari'atkan *mudharabah* dalam Islam adalah sebagai berikut :

a. al-Qur'an

Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu. dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendak”.⁴¹

al-Qur'an surat Al-Baqarah potongan dari ayat 282-283 yang berbunyi:

.... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.⁴²

ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya: “Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”.⁴³

⁴¹ Kementrian Agama, *Al-qur'an Tajwid dan Terjemah...*, h.106.

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ)), h.106.

⁴³ Ibid., h.107

al-Qur'an surat Al-Muzammil potongan ayat 20 yang berbunyi:

....وَأَخْرُونَ يُضْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah”.⁴⁴

al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila shallat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu dibumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”.⁴⁵

al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.⁴⁶

al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka

⁴⁴ Kementrian Agama, *Al-qur'an Tajwid dan Terjemah*..., h.575.

⁴⁵ *Ibid.*, h.554.

⁴⁶ *Ibid.*, h.31.

sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”.⁴⁷

b. Hadis

Hadis yang berkaitan dengan *mudharabah* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Nabi Muhammad Saw. Bersabda:

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَلِيُّ حَدَّثَنَا بِشَرُّ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرَانُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُعَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ فَيَهِنَّ الْبَرَكَاتُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِلْبَيْعِ

Artinya: “Hasan Bin Ali-Khalal menceritakan kepada kami, Basar bin Tsabit Al Bazaar menceritakan kepada kami, Nasr bin Al-Qasim menceritakan kepada kami, dari Abdi Ar-Rahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah Saw, bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (*mudharabah*) dan mencampur gandum dengan jelas untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual” (H.R Ibnu Majah).⁴⁸

c. *Ijma'*

Mudharabah disyari'atkan berdasarkan *ijma'* (kesepakatan) para sahabat dan berdasarkan kesepakatan para imam yang menyatakan kebolehan. Hal ini didasarkan dalil yang mengungkapkan bahwa tolong menolong dalam kebaikan dan saling mencegah dalam hal kemungkar. Diantara *Ijma'* dalam *Mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *Mudharabah*. Perbuatan

⁴⁷ *Ibid.*, h.83.

⁴⁸ Abu Abdullah bin Yazid Ibnu Majah, *Mudharabah Dalam Teori Dari Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia), h.155.

tersebut ditentang oleh sahabat lainya.⁴⁹ Muamalah dalam bentuk *mudharabah* disepakati oleh ulama tentang kebolehan. Dasar kebolehan hukumnya itu adalah pengalaman Nabi yang memperniagakan modal yang diberikan oleh Siti Khadijah sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan kemudian setelah beliau menjadi Nabi.

d. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Pada satu sisi, banyak orang kaya yang mengusahakan hartanya, di sisi lain juga tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja tapi tidak memiliki modal. Maka dengan adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.⁵⁰ Dengan adanya kerja sama kedua belah pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masing bisa dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan.⁵¹

3. Rukun Dan Syarat Bagi Hasil

Rukun dan syarat *Mudharabah* merupakan hal yang sangat penting, karena *Mudharabah* yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya, maka akad kerja samanya tersebut akan dinilai tidak sah

⁴⁹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.226.

⁵⁰ Sohari Sahrani, Ruffah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalola Indonesia, 2011), h.191.

⁵¹ Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.370.

atau batal hukumnya. Oleh karena itu, Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat *mudharabah* sehingga kerja sama itu dapat dibilang sah oleh syara'.

a. Rukun Bagi Hasil yaitu:

Rukun adalah kata *mufrad* dari kata jama' "*arkan*" artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnyanya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk didalam pekerjaan tersebut.⁵²

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan rukun adalah unsur penting yang menyebabkan adanya suatu pekerjaan atas pekerjaan lainnya, yang dalam hal ini adalah pekerjaan kerja sama akad *mudharabah*.

Adapun rukun kerja sama *mudharabah* menurut ulama Syafi'iyah ada enam, yaitu:

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
- 2) Orang yang bekerja, yaitu yang mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
- 3) Aqad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- 4) *Maal*, yaitu harta pokok atau modal

⁵² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: kencana, 2010), h.246.

- 5) *Amal*, yaitu pekerjaan si pengelola harta sehingga dengan pengelola dan
- 6) Keuntungan⁵³

Menurut Malikiyah, bahwa hukum *mudharabah* itu adalah *jaiz*. Sedangkan rukun-rukunnya adalah:

- 1) Modal
- 2) *Amal*
- 3) Laba
- 4) Pihak yang mengadakan perjanjian
- 5) *Sighat* (ijab dan *qabul*)

Menurut Jumhur Ulama, rukun *mudharabah* ada lima yaitu:

- 1) Orang yang berakad
- 2) Modal
- 3) Keuntungan
- 4) Kerja
- 5) *Sighat*, yaitu ijab dan *qabul*.⁵⁴

Menurut Zuhayli, akad *mudharabah* memiliki beberapa rukun yang telah ditentukan guna mencapai kesahannya, yaitu:

- 1) Pemilik dana (*Shahibul Mal*)
- 2) Pengelola (*mudharib*)
- 3) Ucapan serah terima (*sighat ijab wa qabul*)
- 4) Modal (*ra'sul mal*)

⁵³ Sohari Sahrani, Ruffah Abdullah, *Fiqh Muamalah...*, h.199.

⁵⁴ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.177.

5) Pekerjaan

6) Keuntungan⁵⁵

Menurut Amir Syarifudin pada kerja sama *mudharabah* terdapat tiga unsur yang setiap unsur tersebut harus memenuhi syarat sahnya suatu akad *mudharabah*⁵⁶:

- 1) Pemilik modal (*robbul mal*) dan pengusaha atau yang disebut juga yang menjalankan modal (*mudharib*) sebagai pihak yang melakukan kerja sama. Keduanya harus memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perjanjian, yaitu dewasa, sehat akal dan bertindak dengan kesadaran dan pilihan sendiri, tanpa ada paksaan, sedangkan pengusaha atau yang menjalankan modal harus cakap dan mampu bekerja sesuai dengan bidangnya.
- 2) Objek kerja sama atau modal. dan syaratnya harus dalam bentuk uang, jelas jumlahnya, miliknya sempurna dari pemilik modal dan dapat diserahkan pada waktu berlangsung akad.
- 3) Keuntungan atau laba. Keuntungan dibagi sesuai dengan yang disepakati bersama dan ditentukan dalam kadar persentase, bukan dalam angka mutlak yang diketahui secara pasti. Alasannya ialah bahwa yang akan diterima oleh pekerja atau pemilik modal dalam sesuatu yang pasti.

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid6*, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.92.

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, h.246.

Menurut Abdullah Al-Mushlih, seperti bentuk usaha lain, bisnis bagi hasil ini juga memiliki tiga rukun, yaitu dua atau lebih pelaku, objek akad dan pelafalan akad.

1) Dua pihak yang melakukan akad

Kedua pihak disini adalah investor dan pengelola modal. Keduanya disyaratkan memiliki kompensasi beraktivitas. Yakni orang yang tidak dalam kondisi bangkrut terlilit utang, anak kecil, orang gila, orang idiot, semuanya tidak boleh melakukan transaksi ini.

2) Objek akad

Objek akad dalam kerja sama bagi hasil ini tidak lain adalah modal, jenis usaha dan keuntungan.

a) Modal

Modal disyaratkan harus alat tukar seperti emas, perak atau uang secara umum. Penanaman modal ini tidak boleh dilakukan dengan menggunakan barang kecuali, bila sudah disepakati untuk menetapkan nilai harganya dengan uang. Sehingga nilainya itulah yang menjadi modal yang digunakan untuk memulai usaha. Atas dasar itulah hitung-hitungannya dianggap selesai untuk masa kemudian.

b) Jenis usaha

Asal dari usaha dalam bisnis bagi hasil (penanaman modal) adalah dibidang perniagaan atau bidang-bidang terkait

lainnya. Pengelola modal tidak boleh bekerja sama dalam penjualan barang-barang haram berdasarkan kesepakatan ulama, seperti jual beli bangkai, darah, daging babi, minuman kerang dan jual beli riba atau yang sejenisnya.

c) Keuntungan

Keuntungan dalam sistem penanaman modal (bagi hasil) ini hendaknya diketahui secara jelas dan ditegaskan m persentase tertentu bagi pemilik modal dan pengelola modal yang sifatnya merata seperti, setengah, sepertiga atau seperempat dan sejenisnya. Kalau ditetapkan sejumlah keuntungan bagi salah satu pihak, sementara sisanya untuk pihak yang lain, maka itu lah usaha investasi yang tidak sah. Karena bisa jadi keuntungan dari usaha itu hanyalah bagian, sehingga kerja sama itu harus diberhentikan dalam keuntungannya. Lebih rusak lagi dari ini adalah apabila pemilik memberikan syarat persentase tertentu dari modalnya yang tidak terkait dengan usaha penanaman modal karena itu berarti memusyawarahkan antara usaha melalui sistem penanaman modal ini dengan usaha berbasis riba. Ada sejumlah kode etik dalam sistem pembagian keuntungan dalam usaha kerja sama bagi hasil yaitu:

- 1) Keuntungan berdasarkan kesepakatan dua pihak, namun kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal saja dengan syarat kerugian terjadi bukan karena kelalaian pengelola.
- 2) Keuntungan dijadikan sebagai cadangan modal. Kalau ada keuntungan disatu sisi dan kerugian atau kerusakan di sisi lain, maka kerugian atau kerusakan itu harus ditutupi terlebih dahulu oleh keuntungan yang ada, kemudian yang tersisa dibagi-bagikan berdua sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Pengelola tidak boleh mengambil keuntungan sebelum masa pembagian. Alasan tidak dibolehkannya pengelola modal mengambil bagiannya dari keuntungan kecuali setelah masa pembagian karena bisa saja terjadi kerugian setelah itu, sehingga bukan hanya dengan pembagian saja, tetapi agar hak masing-masing dari kedua belah pihak terjaga.

d) Pelafadan akad

Pelafadan akad dalam transaksi muamalah biasanya disebut sengan ijab *qabul* atau *sighat* akad. Pelafadan akad ini dapat dilakukan dengan lisan atau atau tertulis harus dilakukan atas kesepakatan bersama tentang untung ruginya dan hal-hal yang akan terjadi dikemudian hari dan harus dengan bahasa yang jelas dapat dimengerti kedua belah pihak.⁵⁷

⁵⁷ Abdullah Al-Mushlih, Shalah As-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam...*, h.170-178.

Menurut Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun bagi hasil terbagi menjadi tiga yaitu:

- 1) *Shohibul Maal*
- 2) *Mudharib* (pelaku usaha)
- 3) Akad⁵⁸

Sedangkan menurut jumhur ulama rukun dalam bagi hasil itu ada tiga sebagai berikut:

Dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*)

- 1) Modal (*manqud 'alaih*)
- 2) Ijab dan *qabul* (*sighat*)

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah lebih merinci lagi menjadi enam rukun antara lain:

- 1) Pemilik Modal (*shohibul maal*)
- 2) Pelaksana usaha (*mudharib* atau pengusaha)
- 3) Akad dari kedua belah pihak (ijab dan *qabul*)
- 4) Objek bagi hasil (pokok atau modal)
- 5) Usaha (pekerjaan pengelolaan modal)
- 6) Nisbah keuntungan.⁵⁹

⁵⁸ Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islam Teori Dan Praktis*, (Bandung: Pena, 2012), h.158.

⁵⁹ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Gramedia, 2014), h.117.

b. Syarat-syarat Bagi Hasil yaitu:

Syarat-syarat *mudharabah* menurut Sayyid Sabiq adalah berhubungan dengan rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batang (tabar), maka emas hiasan atau barang dagangan lainnya, bagi hasil tersebut batal.
- 2) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasaruf*, maka dibatalkan anak-anak yang masih kecil, orang gila atau orang-orang yang berada dibawah pengampunan.
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 4) Keuntungan yang akan menjadi pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
- 5) Melafazkan ijab dari pemilik modal misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.

6) Bagi hasil bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara dilain waktu tidak terkenan persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad bagi hasil, yaitu keuntungan. Bila di dalam bagi hasil ada persyaratan-persyaratan, maka bagi hasil tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat as-syafi'i dan Malik. Adapun menurut Abu Hanifah dan Ahmad ibn Hambal, bagi hasil tersebut sah.⁶⁰

Adapun menurut syarat-syaratnya Malikiyah mengemukakan sebagai berikut:

- a) Penyerahan modal pada pengelola harus segera, jika penyerahan ditunda, maka *mudharabah fasid*.
- b) Modal harus diketahui jumla hanya sewaktu akad dilaksanakan, oleh karenanya tidak ada *mudharabah* dengan modalnya tidak jelas jumlahnya.
- c) Modal yang dipertanggung jawabkan kepada pengelola
- d) Modalnya harus uang yang berlaku dalam suatu Negara, baik uang cetak maupun bukan
- e) Pembagian keuntungan harus ditegaskan salah satu pihak tidak boleh menentukan suatu yang jelas bagi keuntungannya

⁶⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.197.

- f) Hendaknya pengelola saja yang bekerja
- g) Pemilik modal tidak boleh mempersempit pengelola dalam melakukan pekerjaannya
- h) Tidak menunda waktu.

Adapun syarat sah akad *mudharabah* sangat terkait dengan rukun *mudharabah* sebagaimana yang telah di sebutkan di atas:

1) Berkenaan dengan syarat akad (*aqidain*)

Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan dan menjadi wakil. Khususnya bagi pengusaha (*mudharib*) harus orang-orang yang benar-benar mampu (ahli) serta jujur, bahwa dalam arti bahwa ia bisa dipercaya untuk menjalankan modal sekaligus menjaga modal yang dipercayakan kepadanya.⁶¹

2) Berkenaan dengan syarat modal (*mauqud alaih*) bahwa :

- a) Modal harus berupa uang, seperti dinar, dolar, atau rupiah
- b) Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran
- c) Modal harus ada, bukan berupa utang, artinya modal yang diberikan itu benar-benar milik sendiri
- d) Modal harus diberikan kepada pengusaha. Hal ini dimaksudkan agar pengusaha dapat mengusahakannya, yakni

⁶¹ Moh Fifa'I, *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*, (semarang: CV. Toha Putra, 1978), h.223.

menggunakan harta tersebut sebagai amanah. Berkenaan dengan *sighat* (ijab dan *Qabul*).⁶²

3) Berkenaan dengan laba, yaitu⁶³:

a) Laba harus memiliki ukuran.

Mudharabah dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan (laba). Dengan demikian jika laba tidak jelas maka *mudharabah* dianggap batal.

b) Laba harus berupa bagian yang umum (*masyur*).

Pembagian keuntungan harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara umum, seperti setengah keuntungan yang diberikan kepada pemilik modal sedangkan setengahnya lagi diberikan kepada pengusaha.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang rukun dan syarat dalam akad *mudharabah* yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat dalam akad *mudharabah* yaitu: pelaku (pemilik modal dan pengusaha), objek *mudharabah* (modal dan kerja), persetujuan kedua belah pihak (ijab *qabul*), dan nisbah keuntungan.

Namun dalam kerjasama bagi hasil terdapat tiga unsur yang unsur tersebut harus memenuhi syarat untuk sahnya suatu akad bagi hasil:

1) Pemilik modal yang disebut juga *rabbul maal* dan pengusaha atau disebut juga yang menjalankan *mudharabah* atau *mudarib* sebagai pihak yang melakukan kerjasama.

⁶² Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah...*, h.228.

⁶³ *Ibid.*, h.229.

- 2) Yang merupakan objek kerja sama yaitu modal.
- 3) Keuntungan atau laba yang telah disepakati bersama dalam kadar persentase.⁶⁴

4. Prinsip *Mudharabah*

Secara umum dapat dikemukakan bahwa *mudharabah* sebenarnya merupakan sub *sistem* dari *musaqah*. Namun, para ahli fiqih Islam meletakkan *mudharabah* dalam posisi tersendiri dan memberikan dasar hukum yang khusus, baik dari segi teks Al-Qur'an maupun dari sunnah. Prinsip *mudharabah* adalah prinsip bagi hasil, yaitu perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha.

Pada perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek tersebut atau usaha, dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan membuat usaha dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang diawasi mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung pemilik modal, kecuali kerugian itu terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan pengusaha. Apabila terjadi kerugian yang merupakan konsekuensi bisnis semata (bukan karena penyelewengan) maka kerugian tersebut akan ditanggung secara bersama-sama antara pemodal atau pengusaha sesuai dengan perjanjian. Dengan prinsip

⁶⁴ Amir Syariffuddin, *Garis-garis Besar Fiqh...*, h.246.

tersebut semakin jelas terlihat bahwa sistem ekonomi Islam tampak jenis memiliki sifat dan semangat kebersamaan serta keadilan.⁶⁵

Prinsip-prinsip *mudharabah* ini tidak terlepas dari prinsip-prinsip muamalah Islam. Oleh karenanya *mudharabah* ini harus tetap mengacu pada aturan syari'at Islam dan aturan Fiqih Muamalah menjadi indikatornya. Artinya sesuai atau tidaknya mekanisme dalam *mudharabah* ini sangat ditentukan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah Islam.

Adapun prinsip-prinsip *mudharabah* dalam Islam adalah sebagai berikut:

a. Prinsip kebolehan melakukan akad *mudharabah*

Artinya bahwa akad *mudharabah* itu dibenarkan oleh al-Qur'an dan sunnah Rasul. Dalam *mudharabah* harus tetap pegang teguh pada ketentuan syari'at Islam sebagaimana telah dijelaskan pada landasan hukum *mudharabah* al-Qur'an dan sunnah). *Mudharabah* dibolehkan karena memiliki manfaat bagi orang banyak, terutama bagi kaum lemah dan pengusaha tidak dikenakan tanggungan terhadap modal yang rusak (palit) selama ia tidak melampaui batas dalam arti kerugian itu disebabkan konsekuensi dari bisnis.⁶⁶

⁶⁵ Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, (yogyakarta: Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004), h.84.

⁶⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII, 1990), h.10.

b. Prinsip sukarela tanpa paksaan

Akad *mudharabah* mencerminkan kerelaan untuk bekerja sama, maka tidak boleh salah satu pihak yang melakukan akad ini dalam keadaan terpaksa. Selain itu, akad *mudharabah* bertujuan untuk membantu kehidupan kaum lemah, bukan semata-mata mencari keuntungan, bukan pula salah satu cara untuk mengeksploitir. Untuk itulah dalam bentuk kerja sama ini dituntut adanya kebebasan dari pengusaha untuk berusaha sesuai dengan keinginan pemilik modal.⁶⁷

c. Prinsip mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akad kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf hidup khususnya dalam bidang ekonomi merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa kehidupan manusia mempunyai modal, tetapi tidak bisa mengelola modal tersebut, dan berkeinginan membantu orang lain dengan jalan mengalihkan modal yang dia miliki kepada pihak yang membutuhkan dan mampu mengelola modal tersebut. Berdasarkan kenyataan ini, maka diperlukan kerja sama antara yang memiliki modal dan orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal.

Pada bentuk kerja sama *mudharabah*, pemilik modal dan pengelola modal sangat diuntungkan, disatu sisi pemilik modal

⁶⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*., h.14.

mendapatkan keuntungan dari investasi yang diberikannya. Sementara itu, disisi lain bagi orang yang memerlukan modal ia akan sangat terbantu dengan adanya kerja sama tersebut. Pengusaha berusaha dalam lapangan ekonomi serta terhindari dari pengangguran, terciptalah kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan seperti kemiskinan dan pengangguran.⁶⁸

d. Prinsip keadilan

Sifat semangat, kebersamaan, dan keadilan tampak jelas dalam kerja sama *mudharabah*. Hal ini dilihat melalui kebersamaan dalam menanggung kerugian yang dialami dalam usaha, kerugian akan ditanggung pemilik modal apa bila kerugian itu merupakan akibat (konsekuensi) dari bisnis bukan karena rekayasa. Pihak pengelola menanggung kerugian *skill*, dan waktu, sedangkan apabila mendapatkan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian diatas mengenai prinsip-prinsip *mudharabah* diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem kerja sama antara pemilik modal dan pengelola dalam bentuk akad *mudharabah* ini sangat terasa ketika dapat membantu perekonomian kaum lemah yang mempunyai keahlian tetapi tidak memiliki modal untuk melakukan sebuah usaha guna memenuhi

⁶⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-arba'ah*, Juz II, (Mesirr: Tiariyah Qubra), h.48.

kebutuhan hidup, dan yang terpenting dapat mencegah kesenjangan sosial antara orang kaya dan miskin.

5. Macam-Macam Bagi Hasil

Ulama Hanafiah membentuk akad menjadi dua bentuk,⁶⁹ yaitu *Mudharabah shahihah* (*mudharabah* yang sah) dan *mudharabah fasidah* (*mudharabah* yang rusak). Jika *mudharabah* itu jatuh kepada fasid, pekerja hanya berhak menerima upahnya saja sesuai dengan pekerjaannya dengan pengupahan yang sudah berlaku dikalangan daerah tersebut. Sedangkan seluruh keuntungan menjadi milik pemilik modalnya. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa dalam *mudharabah fasidah*, status pekerjaan tetap seperti dalam *mudharabah shahihah* dalam artian bahwa ia tetap mendapatkan bagian keuntungan.⁷⁰

Kemudian dilihat dari segi transaksi yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pekerjaan, para ulama fiqh membagi akad kepada dua bentuk,⁷¹ yaitu bentuk *mudharabah mutlaqah* (penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat dan pembatas) dan *mudharabah muqayyadah*, pekerja bisa mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan. Akan tetapi, dalam *mudharabah, muqayyadah*, pekerja harus mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang dikemukakan oleh pemilik modal.⁷²

⁶⁹ Ibnu Qadamah, *al-Mughni*, jilid V, (Riyadh: Maktabah Ar-Riyadh al-Haditsah,tt), h.30.

⁷⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Ibid.*, h.167.

⁷¹ Ibnu Qadamah, *al-Mughni*, jilid V..., h.32.

⁷² Nasroen Haroen, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.178.

Sejalan dengan pendapat para ulama fiqh, tokoh-tokoh dalam bidang fiqh muamalah pun membagi akad *mudharabah* kepada dua bentuk, yaitu :

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Akad *mudharabah Muthlaqah* yaitu, pemberi modal menyerahkan modalnya kepada pengusaha untuk dipakai usaha apapun, Tidak dibatasi jenis dan tempatnya, sehingga dalam akad ini pekerjaan atau bidang usaha yang dilakukan oleh pengusaha bersifat mutlak.⁷³

Menurut Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, dalam *mudharabah muthlaqah*, *mudharib* bebas mengelola modal yang diberikan *shahibul maal* untuk tujuan usaha apa saja yang menurut pertimbangannya akan mendatangkan keuntungan.⁷⁴

Tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana saja usaha tersebut dilakukan. Kebebasan *mudharib* dalam hal *mudharabah muthlaqah* bukan kebebasan yang tidak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan oleh *shahibul maal* tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam, seperti memproduksi atau perdagangan minuman keras (sekali pun diperbolehkan atau diizinkan resmi dari pemerintah), peternakan babi, dan lain sebagainya.

⁷³ Ruslan Abdul Ghofur, *Kontruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, Al-‘Adalah Jurnal Hukum Islam, Vol.XII, No.30, Juni 2015.

⁷⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h.1197.

Didalam *mudharabah muthlaqah*, *mudharib* juga memiliki mandat yang terbuka dan berwenang untuk melakukan apa saja yang diperlukan untuk keberhasilan tujuan *mudharabah* itu dalam rangka pelaksanaan bisnis yang bersangkutan. Namun ternyata *mudharib* melakukan kelainan atau kecurangan, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkannya.⁷⁵ Dengan demikian maka hal tersebut jelaslah bahwa *mudharabah muthlaqah* adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk mendapatkan keuntungan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah ditetapkan atau disepakati di awal akad perjanjian.
- 2) Pemilik modal tidak boleh ikut serta dalam pengelolaan usaha, tetapi pemilik modal diperbolehkan membuat usulan atau melakukan pengawasan di dalam usahanya tersebut. *Mudharib* mempunyai kekuasaan penuh untuk mengelola modal dan tidak ada batasannya. Baik itu mengenai tempat, tujuan ataupun jenis usahanya.

b. *Mudharabah Muqayyadah* (terikat)

Mudharabah muqayyadah adalah pemilik modal yang memberikan modalnya kepada seseorang untuk dipakai dalam

⁷⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h.149.

usaha yang telah di tentukan. Dalam jumlah dana dan nisbah bagi hasil yang keseluruhannya berdasarkan kontrak yang telah di sepakati antara kedua belah pihak.⁷⁶

Menurut Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam⁷⁷, dalam *mudharabah muqayyadah*, *mudharib* tidaklah bebas menggunakan modal tersebut menurut hendaknya, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh *shahibul maal*. Syarat-syarat itu misalnya harus berdagang dengan barang-barang tertentu saja, di laksanakan di daerah tertentu, dan harus membeli barang di daerah tertentu.

Apabila *mudharib* bertindak bertentangan dengan pengawas tersebut, maka *mudharib* harus bertanggung jawab sendiri atas konsekuensi yang ditimbulkan. Pada *mudharabah* ini harus dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada jangka waktu tiba.

Sehingga dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *mudharabah muqayyadah* ini merupakan simpanan khusus (*ristricted*), pemilik dana (*shahibul maal*) dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh pihak lain sebagai pengelola (*mudharib*), baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usahanya.⁷⁸

⁷⁶ Ruslan Abdul Ghofur, *Kontruksi Akad*, Al-‘Adalah Jurnal Hukum Islam..., h.495.

⁷⁷ Dewan Redaksi Enslkopedia Hukum Islam, *Ensiklopedia Hukum Islam...*, h.1197.

⁷⁸ Sahrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.52.

6. Hikmah Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Islam mensyari'atkan dan membolehkan bagi hasil demi memberikan kemudahan kepada manusia. Terkadang sebagian yang lain tidak memiliki harta tetapi memiliki kemampuan untuk mengembangkannya.

Karena syari'at membolehkan muamalah ini agar masing-masing dari keduanya mendapatkan manfaat. Pemilik modal memanfaatkan keahlian *mudharib* (pengelola) dan *mudharib* memanfaatkan harta, dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah SWT tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.

Jadi hikmah disyari'atkan *mudharabah* adalah agar manusia dapat melakukan kerja sama dengan masalah perdagangan, karena hal ini termasuk juga saling tolong-menolong. Sebagaimana al-Qur'an Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa ajaran Agama Islam selalu menganjurkan untuk berbuat kebajikan dimuka bumi, yang tujuannya tidak lain untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat.

Mudharabah mengandung hikmah yang besar dalam masyarakat, karena memupuk terhadap individu agar selalu memiliki sifat tolong-menolong dan jiwa gotong royong sesama anggota masyarakat. Selain itu, hikmah disyari'atkannya *mudharabah* yang dikehendaki syar'i yang maha bijaksana adalah untuk menghilangkan kefakiran dan untuk menjalin kasih sayang antara sesama manusia.

Hikmah lain diperbolehkannya kerja sama dengan menggunakan sistem bagi hasil atau *mudharabah* ini adalah terciptanya rasa persaudaraan (*Ukhuwah*) dan rasa tolong-menolong (*ta'awun*) yang erat diantara kaum muslimin yang memiliki suatu keahlian dalam bidang tertentu, sehingga kecemburuan sosial antara umat Islam dalam suatu masyarakat dapat dihindarkan.

7. Hak Dan Kewajiban *Shahibul Mal* Dan *Mudharib*

- a. Hak dan kewajiban pemilik modal
 - 1) Pemilik modal berhak menyediakan dan menyerahkan modal 100%.
 - 2) Pemilik modal memiliki hak penuh atas modal yang diberikan kepada pekerja.
 - 3) Pemilik modal berhak melakukan pengawasan terhadap jalanya kegiatan usaha. Meskipun pekerja tetap mempunyai hak eksklusif untuk mengelola tanpa campur tangan pemilik modal.

- 4) Pemilik modal mempunyai hak untuk memberikan bimbingan, petunjuk serta saran selama kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian pekerja.
- 5) Pemilik modal berkewajiban menanggung biaya operasional seluruh kegiatan usaha yang dijadikan suatu kerjasama.
- 6) Jika kegiatan usaha yang dilakukan pengelola mengalami kerugian maka pemilik modal bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁷⁹

b. Hak dan kewajiban pekerja

Pengelola (*mudharib*) memiliki beberapa hak dalam akad *mudharabah*, yakni nafkah (*living cost* atau biaya hidup) dan keuntungan yang disepakati dalam akad. Ulama berbeda pendapat tentang hak *mudharib* atas aset *mudharabah* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik ketika di rumah maupun dalam perjalanan.

Menurut Imam Syafi'i, *mudharib* tidak berhak mendapatkan nafkah atas kebutuhan pribadinya dari aset *mudharabah*, baik di rumah maupun dalam perjalanan. Karena *mudharib*, kelak akan mendapatkan keuntungan, dan ia tidak berharap mendapatkan manfaat lain dari akad *mudharabah*. Nafkah ini bisa jadi sama nominalnya dengan bagian keuntungan, dan *mudharib* akan mendapatkan lebih. Jika nafkah

⁷⁹Surat Perjanjian Kerja Sama Gaduhan, (on-line), Tersedia di <http://kttsaraswati.blogspot.co.id/2013/04/surat-perjanjian-kerjasama-gaduhan.htm> (07 juni 2019).

ini disyaratkan dalam kontrak maka akad *mudharabah* hukumnya *fasid*.

Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, *mudharib* hanya berhak mendapatkan nafkah dari aset *mudharabah* ketika ia melakukan perjalanan, baik biaya transportasi, makan maupun pakaian. *Madzhab* Hanabilah memberikan keleluasaan, *mudharib* berhak mendapatkan nafkah pribadi, baik di rumah maupun dalam perjalanan, dan boleh menjadikan syarat dan akad.

Menurut Hanafi'yah, *mudharib* berhak mendapatkan nafkah dari aset *mudharabah* untuk memenuhi kegiatan bisnis yang meliputi: makan, minum, pakaian, begitu juga dengan biaya dokter. Semuanya ini diperlukan demi kelancaran bisnis yang dijalankan. Kadar nafkah ini harus disesuaikan dengan yang berlaku di khalayak umum.

Biaya yang dikeluarkan oleh *mudharib* (dalam menjalankan bisnis) akan dikurangi dari keuntungan, namun jika tidak ada keuntungan, akan dikurangkan dari aset *shahibul mall* dan dihitung dari kerugian. Jika *mudharib* melakukan perjalanan bisnis dan menetap selama 15 hari maka biaya perjalanan bisnis ini diambil dari aset *mudharabah*. Ketika ia kembali, jika terdapat biaya sisa perjalanan, harus dikembalikan dan dihitung kembali sebagai aset *mudharabah*. Jika *mudharabah*

menggunakan biaya pribadi maka akan menjadi utang dan akan dikurangkan dari aset *mudharabah*.

Selain itu, *mudharib* juga berhak mendapatkan keuntungan, namun jika bisnis yang dijalankan tidak mendapatkan keuntungan, *mudharib* tidak berhak mendapatkan apapun. Menyangkut keuntungan, *mudharib* tidak berhak mendapatkan apapun. Keuntungan akan dibagikan setelah *mudharib* menyerahkan aset yang diserahkan *shahibul mal* (*ra'sul'mal*) secara utuh, jika masih terdapat kelebihan sebagai keuntungan maka dibagi sesuai dengan kesepakatan .

Menurut Hanafi'yah, Malikiyah dan Syafi'iyah, *mudharib* berhak mendapatkan bagian atas hasil bisnis, tanpa harus dihitung dari keuntungan (*revenue sharing*). Akan tetapi mayoritas, ulama sepakat, *mudharib* harus mengembalikan pokok harta *shahibul mal*, dan ia tidak berhak mendapatkan bagian sebelumnya untuk menyerahkan modal *shahibul mal*. Jika masih terdapat keuntungan, akan dibagi sesuai dengan kesepakatan (*provit sharing*).⁸⁰

8. Berakhirnya Akad Bagi Hasil

Menurut Wahbah Zuhayli, pada prinsipnya kontrak kerja sama dalam permodalan (*mudharabah*) akan berhenti jika salah satu pihak menghentikan kontrak, atau meninggal atau modal yang

⁸⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor:Ghalia Indosia,2010), h. 144-155.

ditanamkan mengalami kerugian ditangan pengelola modal (*mudharib*). Akad kerja sama dalam permodalan (*shaibul maal*) murtad, begitu juga dengan modal (*mudharib*). Selain itu, Wahbah Zuhayli mengatakan, *mudharabah* akan dikatakan *fasid* jika terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi. Akad *mudharabah* ini *fasid*, *mudharib* tidak berhak mendapat keuntungan dari pemburuan, keuntungan ini semua milik *shahibul maal*, *mudharib* hanya berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan.

Dengan alasan keuntungan yang didapat bersumber dari aset yang dimiliki *shahibul maal*, ia harus menanggung beban kerugian yang ada. Dalam akad ini berhak mendapatkan upah, baik betika mendapatkan keuntungan maupun menderita kerugian.⁸¹

Hendi Suhendi menjelaskan bahwa, perjanjian bagi hasil menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

- a. Syarat yang ditentukan sudah tidak terpenuhi. Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungan sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak

⁸¹ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.148.

menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun kecuali atas kelalaiannya.

- b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal tersebut melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian.
- c. Apabila pelaksanaan atau pemilik modal meninggal dunia, atau salah satu pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi batal.⁸²

Selain itu dalam buku Racmat Syafe'i, *mudharabah* dianggap berakhir pada hal berikut:

- a. Pembatalan, larangan berusaha, dan pemecatan.

Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan *mudharabah*, larangan mengusahakan, dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan dan pemecatan tersebut. Akan tetapi jika pengusaha tidak mengetahui bahwa *mudharabah* telah dibatalkan. Pengusaha (*mudharib*) diperolehkan untuk tetap mengusahakannya.

- b. Salah seorang *akid* meninggal dunia. Jumhur ulama' berpendapat bahwa *mudharabah* batal, jika salah seorang *akid*

⁸² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h.143.

meninggal dunia, baik pemilik maupun pengusaha. Hal ini karena *mudharabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak.

- c. Salah seorang *akid* gila. Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *mudharabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mudharabah*.
- d. Pemilik modal *murtad*. Apabila pemilik modal *murtad* (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan *murtad*, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelinya, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan *mudharabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati, hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang *murtad* dibagikan diantara para ahli warisnya.
- e. Modal rusak di tangan pengusaha. Jika harta itu rusak sebelum dibelanjakan, *mudharabah* menjadi batal, hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha.

Demikian juga *mudharabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.

Mudharabah berakhir atau batal apa bila perkara-perkara sebagai berikut:

- a. Pembatalan akad, ketika salah seorang dari kedua belah pihak membatalkan akad, *mudharabah* menjadi berakhir, karena *mudharabah* bersifat tidak mengikat.
- b. Gila atau pingsan, Ketika salah seorang dari kedua pihak yang mengadakan akad berubah menjadi gila atau pingsan, *mudharabah* menjadi berakhir.
- c. Apabila pelaksanaan atau pemilik modal meninggal dunia, maka *mudharabah* tidak dapat diteruskan, karena *mudharabah* tidak bersifat mengikat.⁸³

C. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah suatu cara untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan topik yang sejenis atau suatu penelitian yang pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya. Beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan tema *mudharabah* atau bagi hasil sebagai bahan perbandingan. Setelah melakukan telaah terhadap beberapa penelitian ada beberapa sumber yang memiliki keterkaitan penelitian yang dilakukan.

Penelitian yang berhasil ditemukan adalah penelitian Ardiansyah Aristama (2018) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Perusahaan Dengan Driver Berbasis Online Studi Pada

⁸³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, h.237.

Gojek Selter Kemiling Bandar Lampung”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil antara perusahaan dengan driver berbasis online pada gojek selter kemiling Bandar Lampung. Sedangkan metode yang digunakan deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi dokumentasi dan interview. Hasil penelitian ini bahwa sistem bagi hasil antara perusahaan dengan driver berbasis online telah memenuhi rukun dan syarat kerja sama, dimana pembagian keuntungan telah dibagi secara proposional antara kedua belah pihak, namun dalam hal kerugian seharusnya kedua belah pihak menanggung bersama jika menanggung kerugian.

Ferinda Tiaranisa, dengan judul skripsi ”Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola (Studi Kasus Pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)”. Dalam skripsinya menjelaskan bahwa penerapan bagi hasil antara pihak pemilik cucian mobil dengan pengelola dibagi bersama yang sesuai dengan konsep *mudharabah muqayyadah* yaitu keuntungan yang didapat dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama namun seringkali para penggelut usaha tidak melaksanakan sistem bagi hasil berdasarkan konsep *mudharabah muqayyadah* seperti penulis paparkan diatas dimana pada konsepnya keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian selama bukan kelalaian dari pengelola maka ditanggung oleh pemilik modal.

Nurul Ikhsan Nasution, dengan judul skripsi “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Terhadap Tabungan Menggunakan Akad Mudharabah di PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan KC. Brigjen Katamso Medan”. Dalam skripsinya menjelaskan bahwa latar belakang jika dilihat dari penerapan akad mudharabah nasabah tersebut berpendapat bahwa akad yang digunakan oleh bank syariah masih belumbenar sepenuhnya syariah. Jika dilihat berdasarkan definisi dari akad mudharabah yang menyatakan adanya kesepakatan yang sama-sama disetujui dalam hal bagi hasil. Pihak bank hanya memberikan nisbah yang sudah ditentukan oleh bank itu sendiri. Dengan demikian nasabah hanya bisa menerima tanpa bisa diberi kesepakatan untuk bernegosiasimembuat kesepakatan yang bisa sama-sama disetujui dalam pembagian nisbah bagi hasil.

Meskipun telah disebutkan adanya penelitian yang pernah dilakukan dengan judul yang hampir mirip, akan tetapi dalam penelitian yang peneliti lakukan saat ini melihat subjek, objek dan tempat penelitian berbeda, maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Dengan Sistem Bagi Hasil (Studi Kasus Rumah Makan Padang Dua Saudara Sukabumi, Bandar Lampung).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Afandi,Yazin, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Al-Fauzan,Saleh, *Fikih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Isnani Press, 2005.

Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Inar Grafindo, 2006.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-arba'ah*, Juz II, Mesirr: Tiariyah Qubra, 1991.

Al-Maragi,Musthofa Ahmad, *Tafsir al-Maragi*, Cet 1, Semarang: CV Toha Putra,1984.

Al-Mushlih, Abdullah, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Daruq Haq,2008.

Al-Syarbini, Muhammad, *Al-Iqna Fi Hall Al-Alfadz Abi Syufa*, Indonesia: Dar Al-Ihya Al-Kutub Al-A'rabiyyah.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Arikunto,Suharsimi, *Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.

Asikin, Zainal, *Dasar Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Aziz, Syaifullah, *Fiqh Islam Lengkap*, Surabaya: Asy-Syifa', 2005.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid6*, Penerjemah Abdul Hayyie

Basyir, Azhar, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII, 1990.

Danim,Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.

Departemen Pengembangan Bisnis, Perdagangan & Kewirausahaan Syariah
Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), *Etika Bisnis Islam*,
Jakarta: Gramata Publising, 2011.

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, Bandung: Dipenegoro, 2007.
- Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa* Edisi ke 4, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Ghofur, Ruslan Abdul, *Kontruksi Akad*, Al-'Adalah Jurnal Hukum Islam, Fakultas Syari'ah IAIN RIL., Vol.XII, No.30, Juni 2015.
- Hadi,Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM,1994.
- Haroen, Nasroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*, Jakkarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Idris, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Mangani, Silvanita, Ketut, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Erlangga, 1994.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu pendekatanProposal*, Jakarta: Cet.X PT.Bumi Aksara,2008.
- Masyhuri (ED), *Teori Ekonomi Dalam Islam*, Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,2009.
- Moh Fifa'I, *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*, semarang: CV. Toha Putra, 1978.

- Muhamad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
-, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Business Law Karya Marsh and Soulsby, 1986.
- Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdullah Al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu majah* jilid II, Dar al-Fikr, Beirut, 2004.
- Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, yogyakarta: Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004.
- Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islam Teori Dan Praktis*, Bandung: Pena, 2012.
- Muslaehuddin, Muhammad, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Muslich, Wardi, Achmad, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Naf’an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*, Yogyakarta: Gramedia, 2014.
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Qadamah, Ibnu, *al-Mughni*, jilid V, Riyadh: Maktabah Ar-Riyadh al-Haditsah, tt.
- Ruf’ah Abdullah dan, Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalola Indonesia, 2011.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, Jakarta: pena Ilmu dan Amal, 2006.
-, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa oleh kamaluddin A Marzuki, Jilid XIII, Bandung: Al Ma’arif, 1997.
-, *Fikih Sunnah 13*, Cet.Ke-1, Bandung: PT.Alma’arif, 1987.
-, *Ilmu Ushul Fiqh* Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Syafe’i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: kencana, 2010.

Tim Penyusunan Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Journal:

Ghofur, Ruslan Abdul, Kontruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syari'ah di Indonesia, *Journal Al-'adalah Hukum Islam*, Vol.XII, No. 30, Juni 2015.

Wawancara:

Waki, Wawancara dengan penulis, Sukabumi, 23 September 2019.

Ngisom, Wawancara dengan penulis,, Sukabumi, 23 September 2019.

Mutar, Wawancara, Sukabumi, 23 September 2019.

Bobi, Wawancara, Sukabumi, 23 September 2019.

Yudi ,Wawancara, Sukabumi, 23 September 2019.

Arinil, Wawancara, Sukabumi, 23 September 2019.

Kuntar, Wawancara, Sukabumi, 23 September 2019.

Epri, Wawancara, Sukabumi, 23 September 2019.

mam, Wawancara, Sukabumi, 24 September 2019.

Heri, Wawancara, Sukabumi, 24 September 2019.

Website:

Surat Perjanjian Kerja Sama Gaduhan, (Online), Tersedia di <http://kttsaraswati.blogspot.co.id/2013/04/surat-perjanjian-kerjasama-gaduhan.html/m=1>

Musfufah, *Sistem pengupahan Dalam Islam*, (Online), tersedia di <http://fhufah.blogspot.com/2012/05/sistem-pengupahan-dalam-islam-salah.html>, pada tanggal 05 mei 2019, pukul 15.05.